

**PERBANDINGAN PENGAKUAN PENDAPATAN ANTARA STANDAR
AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) INDONESIA DENGAN USULAN
KONVERGENSI IFRS DAN U.S. GAAP**

Muhammad Syam Kusufi

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTM

Email: kusufi_unijoyo@yahoo.com

Abstract

This study tries to compare the revenue recognition of Financial Accounting Standards (GAAP) with IFRS and U.S. GAAP Convergence. As it is known that during the recognition of revenue in Indonesia are often more frequent use of Financial Accounting Standards (GAAP). This study outlines where the advantages and drawback between the two revenue recognition.

Keywords; Revenue recognition, Financial Accounting Standards, IFRS Convergence

PENDAHULUAN

Laporan keuangan yang berisi informasi akuntansi digunakan oleh pemakai (*user*) dalam pengambilan keputusan ekonomik. Sesuai dengan SFAC No. 1 .laporan keuangan disusun dengan fokus pada pihak investor dan kreditor dianggap sebagai pemakai utama laporan keuangan. Pengguna potensial informasi akuntansi dalam laporan keuangan sebenarnya tidak hanya terdiri dari dua kelompok tersebut, investor dan kreditor, saja melainkan banyak kelompok seperti pemilik, pemasok, karyawan, pengacara, analis dan penasehat keuangan, pemerintah (otoritas pajak), dan lain sebagainya. Namun, FASB menetapkan pemakai potensial informasi akuntansi di dalam menyusun tujuan dan standar akuntansi didasarkan pada *user approach* adalah sesuai dengan tujuan investor dan kreditor. Kedua pengguna tersebut diyakini merupakan kelompok yang paling besar jumlah penggunaanya dibanding kelompok pengguna lainnya.

Pihak investor menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan keputusan apakah akan membeli, mempertahankan, atau menjual (melepas) investasinya pada suatu perusahaan (Kuang, 2005). Sedangkan kreditor menggunakan informasi akuntansi untuk memutuskan pemberian pinjaman dan menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajibannya beserta dengan bunganya (Kuang, 2005). Kedua kelompok tersebut (investor dan kreditor) dalam rangka pengambilan keputusan ekonomiknya memerlukan informasi

akuntansi untuk mengetahui posisi keuangan, kemampuan *earning power*, dan prestasi atau kinerja manajemen dari suatu perusahaan.

Informasi akuntansi disampaikan dalam dua jenis laporan keuangan utama yaitu neraca dan laporan laba-rugi, yang saling berhubungan satu sama lain (artikulasi). Menurut Wolk *et al.* (2008: 330), artikulasi diartikan bahwa dua laporan tersebut (laporan laba rugi dan neraca) didefinisikan secara matematis sedemikian rupa sehingga laba (*net income*) sama dengan perubahan dalam ekuitas pemilik untuk satu periode dengan asumsi tidak ada transaksi modal (*capital transaction*) atau penyesuaian periode sebelumnya (*prior period adjustment*). Lebih lanjut, Kuang (2005) menyatakan artikulasi akan mempengaruhi tiga jenis laporan keuangan yaitu neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. Dengan artikulasi, akan selalu dapat ditunjukkan bahwa laba dalam laporan laba rugi akan sama dengan laba dalam laporan perubahan ekuitas dan jumlah rupiah ekuitas dalam laporan perubahan ekuitas akan sama dengan jumlah rupiah ekuitas dalam neraca. Dengan demikian, pengakuan, pengukuran, dan penilaian elemen pada salah satu dari ketiga laporan keuangan tersebut akan mempengaruhi informasi pada laporan keuangan lainnya (Kuang, 2005).

Pendapatan merupakan salah satu elemen pembentuk laporan laba rugi selain biaya, untung (*gains*), rugi (*losses*), dan laba komprehensif (IAI, 2004). Salah penyajian pada pos pendapatan akan berdampak terhadap perilaku pemakai laporan yang pada akhirnya mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan ekonomik investor. Oleh karena itu, perlu kiranya memperhatikan aspek pengukuran, pengakuan dan penilaian pendapatan.

Di sisi lain, seiring pertumbuhan investasi dan arus modal lintas batas negara dengan penggunaan sistem akuntansi yang berbeda menyebabkan mahal dan rumit bagi investor untuk membandingkan peluang dan membuat keputusan keuangan. Perbedaan dalam sistem akuntansi nasional (*national accounting system*) memaksa perusahaan menambah biaya untuk menyiapkan laporan keuangan berdasar pada model multi pelaporan dalam rangka meningkatkan modal di pasar modal yang berbeda-beda. Terdapat dua sistem yang signifikan dari pelaporan keuangan yang digunakan di pasar modal dunia – yaitu IFRS dan U.S. GAAP. Hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa dua organisasi paling berpengaruh dalam penyusunan standar akuntansi di dunia – FASB dan IASB telah mengakui bahwa dalam rangka pasar modal internasional untuk berfungsi dengan benar, harus ada seperangkat standar akuntansi internasional yang berkualitas tinggi khususnya untuk perusahaan yang *listing* di seluruh dunia. Oleh karena itu, kedua organisasi tersebut melakukan beberapa pertemuan untuk membahas beberapa isu penting untuk dilakukan konvergensi antara U.S. GAAP dengan IFRS termasuk tentang pengakuan pendapatan (Pounder, 2009a; 2009b; Mintz, 2009; dan Schipper *et al.*, 2009).

Weetman (1998) menemukan perbedaan antara U.S. GAAP dan IAS. Meskipun pada tahun 2001 IASB diberi mandat yang kuat oleh konstituen pasar modal utama dunia untuk mengembangkan seperangkat standar akuntansi internasional yang berkualitas tinggi. Usaha yang dilakukan harus mengutamakan untuk membantu menyebarkan IFRS di seluruh dunia dan program konvergensi FASB – IASB.

Pada bulan Oktober 2002, kedua organisasi memulai pekerjaan tersebut secara bersama-sama dan menerbitkan piagam kerjasama. Hal tersebut merupakan langkah yang cukup signifikan terhadap komitmen keduanya untuk melakukan konvergensi U.S. GAAP dengan IFRS (Pounder, 2009a; 2009b; dan Mintz, 2009). Pada Februari 2006 diterbitkan dokumen kerjasama berupa MoU yang menegaskan kembali tujuan mengembangkan standar akuntansi umum yang berkualitas tinggi dan digunakan secara luas di seluruh pasar modal dunia (Pounder, 2009a; 2009b; dan Mintz, 2009). Dokumen kerjasama tersebut meminta untuk menghilangkan perbedaan utama yang ada pada U.S. GAAP dan IFRS.

Perbedaan paling signifikan antara U.S. GAAP dan IFRS adalah dalam area pendekatan yang umum. IFRS didasarkan pada dasar prinsip akuntansi dengan panduan aplikasi yang terbatas (*principle-based standards*), dan U.S. GAAP didasarkan khususnya pada aturan dengan panduan aplikasi yang spesifik (*rule-based standards*) (Bohusova dan Nerudova, 2009). FASB dan IASB berinisiatif memasukkan ke dalam proyek kerjasama mereka untuk pencatatan pendapatan sebagai bagian dari MoU mereka untuk mengkonvergensi IFRS dan U.S. GAAP.

Usaha kedua organisasi tersebut untuk mengkonvergensi dua standar mereka menyarankan perlunya pendekatan baru untuk menyesuaikan dengan hasil konvergensi kedua standar akuntansi yang paling berpengaruh di dunia tersebut. Oleh karena itu, perlu dibandingkan pula dampak konvergensi kedua standar akuntansi tersebut terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Perbedaan yang muncul antara SAK Indonesia dengan hasil konvergensi tersebut dapat menyebabkan tambahan biaya bagi perusahaan Indonesia yang akan melakukan *listing* di pasar modal U.S. seperti halnya PT. Telkom.

PENGAKUAN PENDAPATAN MENURUT SAK

Definisi Pendapatan

Definisi pendapatan (*revenue*) menurut IAI (PSAK 23) adalah:

Arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama suatu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal (p. 6)

Definisi pendapatan di atas, IAI mengadopsi dari definisi pendapatan menurut IASC yang menempatkan pendapatan sebagai unsur penghasilan (*income*) (Kuang, 2005). Lebih lanjut lagi, Suwardjono (2005) dan Kuang (2005) menyebutkan beberapa karakteristik pendapatan yang diturunkan dari definisi pendapatan menurut FASB (SFAC No. 6), IAI (SAK, 2002), dan APB (Statement No. 4, prg. 134):

1. Aliran masuk atau kenaikan aset
2. Kegiatan yang merepresentasikan operasi utama atau sentral yang menerus
3. Pelunasan, penurunan, atau pengurangan kewajiban
4. Suatu entitas
5. Produk perusahaan
6. Pertukaran produk
7. Menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa bentuk
8. Mengakibatkan kenaikan ekuitas

Kuang (2005) menjelaskan bahwa beberapa karakteristik di atas dapat dikatakan turunan/konsekuensi yang dikandung yaitu karakteristik 3 sampai 7 sebenarnya merupakan penjabaran atau konsekuensi dari kedua karakteristik sebelumnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa karakteristik 1 dan 2 merupakan karakteristik utama sedangkan lainnya merupakan karakteristik konsekuensi, pendukung, atau penjelas.

Kriteria Pengakuan Pendapatan

Pengakuan sebagai pencatatan suatu item dalam perkiraan-perkiraan dan laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, beban, keuntungan (*gain*) dan kerugian (*losses*). Pengakuan itu termasuk penggambaran suatu item baik dalam kata-kata maupun dalam jumlahnya, dimana jumlah mencakup angka-angka ringkas yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Empat kriteria mendasar yang harus dipenuhi sebelum suatu item dapat diakui adalah (Kuang, 2005: 60):

1. Definsi item dalam pertanyaan harus memenuhi definisi salah satu dari tujuh unsur laporan keuangan yaitu aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian.
2. Item tersebut harus memiliki atribut relevan yang dapat diukur secara andal, yaitu karakteristik, sifat atau aspek yang dapat dikuantifikasi dan diukur.
3. Relevansi informasi mengenai item tersebut mampu membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan.

4. Reliabilitas informasi mengenai item tersebut dapat digambarkan secara wajar dapat diuji, dan netral.

Empat kriteria pengakuan di atas, diterapkan pada semua item yang akan diakui pada laporan keuangan. Namun SFAC No.5 menyatakan persyaratan yang lebih mengikat dalam hal pengakuan komponen laba dan pada pengakuan perubahan lainnya dalam aktiva atau kewajiban. Sebagai tambahan pada empat kriteria pengakuan secara umum yang telah dijelaskan sebelumnya, Ammons *et al.* (2009) menyatakan bahwa pendapatan dan keuntungan umumnya diakui apabila:

1. Pendapatan dan keuntungan tersebut telah direalisasikan atau dapat direalisasikan.
2. Pendapatan dan keuntungan tersebut telah dihasilkan karena sebagian besar dari proses untuk menghasilkan laba telah selesai.

Pendapatan direalisasikan ketika kas diterima untuk barang dan jasa yang dijual. Pendapatan itu dapat direalisasikan ketika klaim atas kas (misalnya, aktiva non kas seperti piutang usaha) diterima yang ditentukan dapat segera dikonversikan ke dalam kas tertentu. Pendapatan dihasilkan ketika perusahaan secara mendasar menyelesaikan semua yang harus dilakukannya agar dikatakan menerima manfaat dari pendapatan yang terkait. Secara umum pendapatan diakui ketika proses menghasilkan laba diselesaikan atau sebenarnya belum diselesaikan selama biaya-biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proses menghasilkan laba dapat diestimasi secara tepat (Kuang, 2005; dan Joni, 2005).

Pengakuan Pendapatan Menurut Standar Akuntansi Keuangan No. 23.

Berdasarkan definisi pendapatan menurut PSAK No. 23, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima perusahaan itu sendiri, di luar dari pernyataan di atas yang tidak memiliki manfaat ekonomi dalam peningkatan ekuitas bagi perusahaan dikeluarkan dari pendapatan. Saat menentukan pendapatan diakui dapat ditinjau dari besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dapat diukur dan dapat diukur dengan handal.

Pendapatan yang timbul dari kegiatan normal perusahaan memiliki identifikasi tertentu. Menurut PSAK No. 23 kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi, namun dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut kepada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal supaya mencerminkan substansi dari transaksi tersebut. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-sama bila transaksi tersebut terikat sedemikian rupa sehingga pengaruh

komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat rangkaian transaksi tertentu secara keseluruhan.

Pendapatan dari penjualan barang harus segera diakui bila seluruh kriteria berikut ini terpenuhi (Joni, 2005):

- ❖ Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memudahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
- ❖ Perusahaan tidak lagi mengelola atau pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- ❖ Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan handal;
- ❖ Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir ke perusahaan tersebut;
- ❖ Biaya yang akan terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan handal.

Menurut PSAK No. 23, bila salah satu kriteria di atas tidak dipenuhi, maka pengakuan pendapatan harus ditangguhkan. Pendapatan tidak diakui apabila perusahaan tersebut menahan resiko dari kepemilikan, antara lain :

- ❖ Bila perusahaan menahan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan suatu hal yang tidak memuaskan yang tidak dijamin sebagaimana lazimnya;
- ❖ Bila penerimaan pendapatan dari suatu penjualan tertentu tergantung pada pendapatan pembeli yang bersumber dari penjualan barang yang bersangkutan;
- ❖ Bila pengiriman barang tergantung pada instalasinya, dan instalasi tersebut merupakan bagian signifikan dari kontrak yang belum diselesaikan oleh perusahaan; dan
- ❖ Bila pembeli berhak untuk membatalkan pembelian berdasarkan alasan yang ditentukan dalam kontrak dan perusahaan tidak dapat memastikan apakah akan terjadi return.

Pendapatan dan transaksi penjualan jasa dapat diestimasi atas tugas yang disepakati perusahaan. Pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut diakui pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Menurut Standar Akuntansi Keuangan, penjualan jasa dapat diakui dengan metode persentase penyelesaian, bila memenuhi seluruh kondisi berikut:

- ❖ Jumlah pendapatan dapat diukur dengan handal;
- ❖ Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
- ❖ Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal; dan
- ❖ Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya tidak menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.

Pengukuran Pendapatan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan, pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun jika terdapat perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Nilai wajar disini dimaksudkan sebagai suatu jumlah dimana kegiatan mungkin ditukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memakai dan berkeinginan untuk meakukan transaksi wajar, kemungkinan kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima.

Barang yang dijual atau jasa yang diberikan untuk diperkirakan atau barter dengan barang atau jasa yang tidak sama, maka pertukaran dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan. Tetapi bila barang atau jasa yang dipertukarkan untuk barang atau jasa dengan sifat dan nilai yang sama maka pertukaran tersebut tidak dianggap sebagai transaksi yang mengakibatkan pendapatan.

Masalah Pengakuan Pendapatan

Pada penjelasan sebelumnya konsep pendapatan hingga saat ini sulit dirumuskan oleh para ahli ekonomi maupun akuntansi, hal ini disebabkan pendapatan menyangkut prosedur tertentu, perubahan nilai tertentu dan waktu pendapatan harus dilaporkan (Joni, 2005). Dalam definisi pendapatan sebagai produk perusahaan dalam mengukur dan melaporkan pendapatan masih menghadapi masalah. Suatu alternatif pengakuan pendapatan pada waktu penyelesaian kegiatan utama ekonomi adalah konsep pelaporan pendapatan berdasarkan kejadian kritis (*critical event*) atau yang paling menentukan (Myers, 1994), dengan kata lain sebagian pendapatan diakui kemudian jika fungsi atau kegiatan ekonomi tambahan akan terjadi kemudian.

Seperti dijelaskan di atas, bahwa pendapatan dapat diakui jika terdapat kemungkinan bahwa ada manfaat ekonomi di masa datang yang akan mengalir ke perusahaan dan pendapatan dapat diukur dengan handal. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima (PSAK No. 23 par. 8). Jika dilihat pada definisi pendapatan pada PSAK No. 23 paragraf 6, mengarah pada *measurement model (fair value model)* sesuai dengan IAS 18, dan memunculkan permasalahan sebagaimana yang diungkapkan oleh Schipper *et al.* (2009)

yaitu *measurement model* memerlukan usaha dan keahlian yang signifikan dari ahli profesional untuk mengestimasi *exit prices* dan mungkin hasil dari estimasi tersebut sulit untuk diverifikasi.

Namun, jika dibandingkan dengan paragraf 8 dan 9, terjadi ketidakkonsistenan antara definisi pendapatan dengan kriteria pengakuan pendapatan, yaitu kriteria pengakuan pendapatan lebih mengarah pada nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Konsep nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu harga penjualan tunai akhir dikurangi biaya tambahan untuk memproduksi dan menjual (Wolk *et al.*, 2008: 200). Salah satu kesulitan utama konsep realisasi adalah bahwa realisasi mempunyai arti berbeda-beda bagi setiap orang. Di dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini digunakan hanya untuk mengartikan pengakuan pendapatan. Tetapi banyak para ahli menggunakan istilah realisasi tersebut dalam arti memandangnya sebagai aturan khusus yang cocok bagi pelaporan transaksi, sedangkan yang lain akan memasukkan semua kenaikan nilai tanpa mempermasalahkan jenis dan sumbernya.

Dari berbagai istilah dan penjelasan mengenai pengakuan pendapatan yang dijelaskan di atas terlihat dengan jelas bahwa hingga saat ini belum ada kesepakatan diantara para ahli berkaitan dengan masalah pengakuan pendapatan, hal ini mungkin saja disebabkan perbedaan geografis dan keadaan, serta praktek-praktek yang akan dihadapi di masing-masing daerah atau negara. Untuk itu bagi perusahaan dalam menggunakan konsep pengakuan pendapatan memilih salah satunya dalam menggunakan konsep pengakuan pendapatan dan diharapkan diterapkan secara konsisten dalam perusahaan.

PENGAKUAN PENDAPATAN MENURUT USULAN KONVERGENSI ANTARA U.S. GAAP DAN IFRS

Usulan terhadap konvergensi antara U.S. GAAP dan IFRS dalam area pengakuan pendapatan dijelaskan dan dikomentari oleh Schipper *et al.* (2009) yang menjelaskan bahwa mereka (IASB dan FASB) mengusulkan dua metode pengakuan pendapatan yaitu *customer consideration model* dan *measurement model (fair value model)*. Kedua model tersebut sama-sama melihat pengakuan pendapatan dalam kontrak dengan pelanggan. Sebagaimana disebutkan oleh Pounder (2009a) bahwa terdapat elemen konsep yang perlu didiskusikan yaitu:

1. Kontrak antara sebuah entitas pelaporan dan pelanggannya,
2. Hak dan kewajiban yang timbul dari kontrak dengan pelanggan,
3. Pengakuan atas kontrak aset dan kewajiban yang timbul dari kontrak hak dan kewajiban, dan

4. Pengakuan pendapatan yang muncul dari perubahan dalam kontrak aset dan kewajiban.

Lebih lanjut Schipper *et al.* (2009) menjelaskan bahwa kedua model tersebut didasarkan pada pengidentifikasian dan melaporkan hak/*rights (contract assets)* dan kewajiban (*performance obligations*) yang muncul dalam sebuah kontrak dengan seorang pelanggan. Kedua model mensyaratkan pengidentifikasian isi *performance obligations* dalam kontrak dan mengakui pendapatan ketika *performance obligations* terpenuhi. Namun, definisi hak dan *performance obligations* dan penetapan kapan *performance obligations* terpenuhi belum menemukan solusi pemecahannya pada kedua model tersebut (Schipper *et al.*, 2009). *Customer consideration model* menekankan pada harga beli untuk mencatat *performance obligations*, sedangkan *measurement model* menggunakan *exit prices* untuk mengukur dan mengukur ulang sisa kewajiban pada masing-masing tanggal pelaporan. Lebih lanjut, Schipper *et al.* (2009) menyarankan untuk menggunakan *customer consideration model* daripada *measurement model* karena *measurement model* memerlukan usaha dan keahlian yang signifikan dari ahli profesional untuk mengestimasi *exit prices* dan mungkin hasil dari estimasi tersebut sulit untuk diverifikasi.

Pendapat yang lain, seperti yang dijelaskan oleh Bohusova dan Nerudova (2009) bahwa ada dua pendekatan yang memungkinkan untuk pengakuan pendapatan. Model *earning process* digunakan dalam SFAC No. 5 – pendapatan diakui ketika pembayaran direalisasi atau dapat direalisasi dan *earning process* diselesaikan. Model *earning process* diterapkan secara tidak konsisten diantara transaksi yang sama. Model ini mencoba untuk menghitung pendapatan secara langsung tanpa mempertimbangkan bagaimana aset dan kewajiban diperoleh dan berubah selama pertukaran dengan pelanggan (Kuang, 2005; dan Joni, 2005). Karena aset dan kewajiban diabaikan, debit dan kredit tangguhan kadang-kadang timbul yang tidak memenuhi definisi aset dan kewajiban. *Earning process* merupakan produk dari U.S. GAAP (Bohusova dan Nerudova, 2009).

Model aset dan kewajiban adalah pendekatan kedua yang memungkinkan untuk pengakuan pendapatan. Model ini konsisten dengan definisi pendapatan yang ada dalam IFRS dan U.S. GAAP. Model ini fokus pada perubahan dalam nilai aset bersih atau perubahan dalam aset dan kewajiban itu sendiri untuk menentukan *income* (Wolk *et al.*, 2008: 333), yang nantinya juga berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan, karena pendapatan itu sendiri tidak diukur secara langsung. Berdasar model ini tidak diakui debit dan kredit tangguhan yang tidak sesuai dengan definisi aset dan kewajiban. Dalam opini IASB dan FASB, model ini mendorong lebih *faithful* dan lebih konsisten gambaran dari transaksi ekonomi yang mendasarinya daripada model *earning process* (Bohusova dan Nerudova, 2009).

Ada sebuah permasalahan dalam penerapan model aset dan kewajiban – yang mana aset dan kewajiban mempengaruhi pendapatan. Definisi pendapatan yang berlaku menyediakan beberapa petunjuk dalam area ini. Tidak ada secara konsep jawaban yang benar atau salah tentang aset atau kewajiban yang mana yang seharusnya mempengaruhi pendapatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bohusova dan Nerudova (2009), hal ini tergantung pada cara pandang dan jenis industrinya. Misalnya, pada pendapatan industri pengolahan kayu, dapat didefinisikan oleh perubahan nilai kayu yang tumbuh – sebagaimana tumbuhnya kayu, maka pendapatan diakui. FASB dan IASB dapat hanya memilih sekumpulan aset dan kewajiban yang paling mungkin untuk menghasilkan pengakuan pendapatan yang merupakan keputusan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Definisi pengakuan pendapatan seharusnya fokus hanya pada aset dan kewajiban yang muncul dari kontrak dengan pelanggan (Bohusova dan Nerudova, 2009).

IASB dan FASB, sejalan dengan penjelasan sebelumnya oleh Schipper *et al.* (2009) dan Pounder (2009a), merumuskan definisi umum pendapatan berdasarkan pada model aset dan kewajiban yang memfokuskan pada kontrak dengan pelanggan seharusnya menjadi: **Pendapatan merupakan peningkatan dalam kontrak aset atau penurunan dalam kontrak kewajiban yang dihasilkan dari penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan.** Perubahan dalam aset atau dalam kewajiban dikaitkan pada penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan dan yang membedakan pendapatan kontrak yang dihasilkan dari kontrak lainnya. Pendapatan timbul karena barang dan jasa disediakan, hal ini mendorong untuk sebuah peningkatan dalam sebuah kontrak aset atau penurunan dalam sebuah kontrak kewajiban. Penting untuk memahami ketika barang atau jasa tersedia atau berpindah kepada pelanggan. Beberapa kriteria untuk mengidentifikasi ketika barang atau jasa telah berpindah kepada pelanggan haruslah ada (Bohusova dan Nerudova, 2009):

- ❖ Dalam kasus barang – sebuah entitas harus memindahkan aset ketika telah berada dalam pengendalian pelanggan,
- ❖ Dalam kasus jasa – ketika pelanggan telah menerima jasa yang dijanjikan,
- ❖ Dalam kasus kontrak konstruksi jangka panjang – sebuah entitas memenuhi sebuah kewajiban kinerja (*performance obligations*) selama konstruksi hanya jika sebagian aset yang dibangun telah dikendalikan oleh pelanggan.

Pendapatan diakui ketika:

- ❖ Sebuah entitas mendapatkan kontrak dimana hak yang mendasarinya melebihi kewajiban yang mendasarinya.
- ❖ Entitas kemudian memenuhi kewajibannya dalam kontrak dengan menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan.

PERBANDINGAN SAK INDONESIA DENGAN KONVERGENSI IFRS DAN U.S. GAAP

Perbedaan pertama pengakuan pendapatan antara SAK Indonesia yang terdapat pada PSAK No. 23 dengan usulan konvergensi U.S. GAAP dan IFRS terjadi jika apa yang diusulkan oleh Schipper *et al.* (2009) ditolak oleh sebagian besar peserta diskusi antara FASB dan IASB untuk merumuskan konvergensi kedua standar akuntansi yang dihasilkan kedua organisasi tersebut. Schipper *et al.* (2009) mengusulkan agar pengakuan pendapatan menggunakan *customer consideration model* daripada *measurement model* dikarenakan alasan kemudahan dalam verifikasi dan terhindar dari kesalahan *professional judgment* untuk menentukan *exit prices*.

PSAK No. 23 lebih mengarah pada *customer consideration model* yang *performance obligations*-nya didasarkan pada harga jual relatif barang dan jasa (Schipper *et al.*, 2009). Hal ini konsisten dengan apa yang disarankan oleh PSAK No. 23 yaitu menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Perbedaan kedua, jika peserta diskusi menyetujui apa yang diusulkan oleh Bohusova dan Nerudova (2009) bahwa ada dua pendekatan yang memungkinkan untuk pengakuan pendapatan. Model aset dan kewajiban adalah pendekatan kedua yang lebih memungkinkan untuk pengakuan pendapatan daripada model *earning process* seperti yang dianut oleh PSAK No. 23. Dalam opini IASB dan FASB, model ini mendorong lebih *faithful* dan lebih konsisten gambaran dari transaksi ekonomi yang mendasarinya daripada model *earning process*.

Meskipun terdapat permasalahan dalam penerapan model aset kewajiban, sebagaimana dijelaskan di atas, namun jika dikaitkan dengan konsep pengakuan pendapatan dalam kontrak dengan pelanggan akan memberikan solusi yang lebih baik jika definisi hak dan *performance obligations* dan penetapan kapan *performance obligations* terpenuhi dapat menemukan solusi pemecahannya sebagaimana dijelaskan oleh Schipper *et al.* (2009).

KESIMPULAN

Menurut PSAK No. 23 pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima perusahaan itu sendiri. Saat menentukan pendapatan diakui dapat ditinjau dari besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke perusahaan dapat diukur dan dapat diukur dengan handal. Kriteria pengakuan pendapatan biasanya diterapkan secara terpisah kepada setiap transaksi, namun dalam keadaan tertentu adalah perlu untuk menerapkan kriteria pengakuan tersebut kepada komponen-komponen yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari suatu transaksi tunggal supaya mencerminkan

substansi dari transaksi tersebut. Sebaliknya, kriteria pengakuan diterapkan pada dua atau lebih transaksi bersama-sama bila transaksi tersebut terikat sedemikian rupa sehingga pengaruh komersialnya tidak dapat dimengerti tanpa melihat rangkaian transaksi tertentu secara keseluruhan.

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dengan pembeli atau pemakai aktiva tersebut. Jumlah tersebut diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima perusahaan dikurangi jumlah diskon dagang dan rabat volume yang diperbolehkan oleh perusahaan. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima. Namun, jika terdapat perbedaan antara nilai wajar dan jumlah nominal, maka imbalan tersebut diakui sebagai pendapatan bunga. Nilai wajar disini dimaksudkan sebagai suatu jumlah dimana kegiatan mungkin ditukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memakai dan berkeinginan untuk meakukan transaksi wajar, kemungkinan kurang dari jumlah nominal kas yang diterima atau dapat diterima.

Pengakuan pendapatan menurut Standar Akuntansi Keuangan bukan tanpa masalah. Pendapatan dapat diakui jika terdapat kemungkinan bahwa ada manfaat ekonomi di masa datang yang akan mengalir ke perusahaan dan pendapatan dapat diukur dengan handal. Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima (PSAK No. 23 par. 8). Jika dilihat pada definisi pendapatan pada PSAK No. 23 paragraf 6, mengarah pada *measurement model (fair value model)* sesuai dengan IAS 18.

Namun, jika dibandingkan dengan paragraf 8 dan 9, terjadi ketidakkonsistenan antara definisi pendapatan dengan kriteria pengakuan pendapatan, yaitu kriteria pengakuan pendapatan lebih mengarah pada nilai realisasi bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), sedangkan jika mengacu pada IAS 18 lebih pada *exit prices*. Konsep nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu harga penjualan tunai akhir dikurangi biaya tambahan untuk memproduksi dan menjual (Wolk *et al.*, 2008: 200). Salah satu kesulitan utama konsep realisasi adalah bahwa realisasi mempunyai arti berbeda-beda bagi setiap orang. Di dalam pengertian yang lebih luas, istilah ini digunakan hanya untuk mengartikan pengakuan pendapatan. Tetapi banyak para ahli menggunakan istilah realisasi tersebut dalam arti memandangnya sebagai aturan khusus yang cocok bagi pelaporan transaksi, sedangkan yang lain akan memasukkan semua kenaikan nilai tanpa mempermasalahkan jenis dan sumbernya.

Sedangkan usulan terhadap konvergensi antara U.S. GAAP dan IFRS dalam area pengakuan pendapatan dijelaskan dan dikomentari oleh Schipper *et al.* (2009) yang menjelaskan bahwa mereka (IASB dan FASB) mengusulkan dua metode pengakuan pendapatan yaitu *customer consideration model* dan *measurement model (fair value model)*. Kedua model tersebut sama-sama melihat pengakuan pendapatan dalam kontrak dengan pelanggan. Sebagaimana disebutkan oleh Pounder (2009a).

Lebih lanjut Schipper *et al.* (2009) menjelaskan bahwa kedua model tersebut didasarkan pada pengidentifikasian dan melaporkan hak/*rights (contract assets)* dan kewajiban (*performance obligations*) yang muncul dalam sebuah kontrak dengan seorang pelanggan. Lebih lanjut, Schipper *et al.* (2009) menyarankan untuk menggunakan *customer consideration model* daripada *measurement model* karena *measurement model* memerlukan usaha dan keahlian yang signifikan dari ahli profesional untuk mengestimasi *exit prices* dan mungkin hasil dari estimasi tersebut sulit untuk diverifikasi.

Pendapat yang lain, seperti yang dijelaskan oleh Bohusova dan Nerudova (2009) bahwa ada dua pendekatan yang memungkinkan untuk pengakuan pendapatan. Model *earning process* digunakan dalam SFAC No. 5 – pendapatan diakui ketika pembayaran direalisasi atau dapat direalisasi dan *earning process* diselesaikan. Model ini mencoba untuk menghitung pendapatan secara langsung tanpa mempertimbangkan bagaimana aset dan kewajiban diperoleh dan berubah selama pertukaran dengan pelanggan (Kuang, 2005; dan Joni, 2005). *Earning process* merupakan produk dari U.S. GAAP (Bohusova dan Nerudova, 2009).

Model aset dan kewajiban adalah pendekatan kedua yang memungkinkan untuk pengakuan pendapatan. Model ini konsisten dengan definisi pendapatan yang ada dalam IFRS dan U.S. GAAP. Model ini fokus pada perubahan dalam nilai aset bersih atau perubahan dalam aset dan kewajiban itu sendiri untuk menentukan *income* (Wolk *et al.*, 2008: 333), yang nantinya juga berpengaruh terhadap pengakuan pendapatan, karena pendapatan itu sendiri tidak diukur secara langsung. Dalam opini IASB dan FASB, model ini mendorong lebih *faithful* dan lebih konsisten gambaran dari transaksi ekonomi yang mendasarinya daripada model *earning process*.

Ada sebuah permasalahan dalam penerapan model aset dan kewajiban – yang mana aset dan kewajiban mempengaruhi pendapatan. Tidak ada secara konsep jawaban yang benar atau salah tentang aset atau kewajiban yang mana yang seharusnya mempengaruhi pendapatan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bohusova dan Nerudova (2009), hal ini tergantung pada cara pandang dan jenis industrinya. FASB dan IASB dapat hanya memilih sekumpulan aset dan kewajiban yang paling mungkin untuk menghasilkan pengakuan pendapatan yang

merupakan keputusan yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan. Definisi pengakuan pendapatan seharusnya fokus hanya pada aset dan kewajiban yang muncul dari kontrak dengan pelanggan (Bohusova dan Nerudova, 2009).

IASB dan FASB, sejalan dengan penjelasan sebelumnya oleh Schipper *et al.* (2009) dan Pounder (2009a), merumuskan definisi umum pendapatan berdasarkan pada model aset dan kewajiban yang memfokuskan pada kontrak dengan pelanggan seharusnya menjadi: **Pendapatan merupakan peningkatan dalam kontrak aset atau penurunan dalam kontrak kewajiban yang dihasilkan dari penyediaan barang dan jasa kepada pelanggan.** Perubahan dalam aset atau dalam kewajiban dikaitkan pada penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan dan yang membedakan pendapatan kontrak yang dihasilkan dari kontrak lainnya. Pendapatan timbul karena barang dan jasa disediakan, hal ini mendorong untuk sebuah peningkatan dalam sebuah kontrak aset atau penurunan dalam sebuah kontrak kewajiban. Penting untuk memahami ketika barang atau jasa tersedia atau berpindah kepada pelanggan.

Perbedaan pertama pengakuan pendapatan antara SAK Indonesia yang terdapat pada PSAK No. 23 dengan usulan konvergensi U.S. GAAP dan IFRS terjadi jika apa yang diusulkan oleh Schipper *et al.* (2009) ditolak oleh sebagian besar peserta diskusi antara FASB dan IASB untuk merumuskan konvergensi kedua standar akuntansi yang dihasilkan kedua organisasi tersebut. PSAK No. 23 lebih mengarah pada *customer consideration model* yang *performance obligations*-nya didasarkan pada harga jual relatif barang dan jasa (Schipper *et al.*, 2009). Hal ini konsisten dengan apa yang disarankan oleh PSAK No. 23 yaitu menggunakan nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Perbedaan kedua, jika peserta diskusi menyetujui apa yang diusulkan oleh Bohusova dan Nerudova (2009) bahwa ada dua pendekatan yang memungkinkan untuk pengakuan pendapatan. Model aset dan kewajiban adalah pendekatan kedua yang lebih memungkinkan untuk pengakuan pendapatan daripada model *earning process* seperti yang dianut oleh PSAK No. 23. Dalam opini IASB dan FASB, model ini mendorong lebih *faithful* dan lebih konsisten gambaran dari transaksi ekonomi yang mendasarinya daripada model *earning process*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammons, J. L., Schneider, G.P., and Sheikh, Aamer. (2009). Revenue Recognition And Financial Statements Disclosure For Gift Card Issuers, *Proceeding of The Intenational Academy for Case Studies*, Vol. 16, No. 1, New Orleans.

- Bohusova, Hana, and Nerudova, Danuse. (2009). US GAAP And IFRS Convergence In The Area of Revenue Recognition. *Economics and Management*, Vol. 14, 12 – 19.
- IAI. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 23 tentang Pendapatan*. 2004
- Joni (2005). Evaluasi Penerapan Saat Pengakuan Pendapatan Terhadap Kelayakan Laba Secara Periodik (Studi Kasus Pada Perusahaan Konstruksi). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, 71 – 90.
- Kuang., Tan Ming (2005). Analisis Berbagai Kasus Pengakuan Pendapatan Dalam Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 5, No. 1, 54 – 70.
- Mintz, Steven M. (2009). Proposed Changes in Revenue Recognition Under U.S. GAAP and IFRS. *The CPA Journal*, Desember 2009.
- Myers, John H. (1994). *The Critical Event and Recognition of Net Profit*. Diedit oleh Stephen A. Zeff dan Bala G. Dharan, Reading and Notes on Financial Accounting, 4th Ed, McGraw-Hill International Editions.
- Pounder, Bruce. (2009a). A Fresh Look at Revenue Recognition. *Strategic Finance*, March 2009.
- Pounder, Bruce. (2009b). Revenue Recognition: New Answer to “How Much?” and “When?”. *Strategic Finance*, November 2009.
- Schipper, K. A., Schrand, C. M., Shevlin, Terry., and Wilks, T. J. (2009). Reconsidering Revenue Recognition. Commentary. *Accounting Horizon*, Vol. 23, No. 1, 55-68.
- Suwardjono (2005). *Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan*. Edisi ketiga. BPFE FEB-UGM, Yogyakarta.
- Weetman, P. (1998). Profit Measurement and UK Accounting Standards: A Case of Increasing Disharmony In Relation to U.S. GAAP and IASs’. *Accounting and Business Research*, Summer.
- Wolk, H. I., Dodd, J. L., dan Rozycki, J. J. (2008). *Accounting Theory: Conceptual Issues in a Political and Economic Environment*. SAGE Publication, California.